



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sabiqinal Awwalin (NIM C02304028) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2010

Pembimbing

Drs. H. M. Faisol Munif, M. Hum
NIP . 195812301988021001

Dalam hukum pidana Islam, peneliti belum menemukan adanya contoh amnesti yang diberikan kepada pelaku tindak pidana politik yang dalam hukum pidana Islam disebut *Al-Bagyu*, dan juga tindak pidana politik yang dilakukan belum secara jelas bagaimana nantinya apakah dapat diberikannya amnesti atau *syafā'at*. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis menganggap perlu diadakannya penelitian mengenai pemberian amnesti bagi pelaku kejahatan politik di Indonesia menurut pandangan hukum pidana Islam.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aturan-aturan yang dijadikan landasan untuk memberikan amnesti.
2. Yang berwenang memberikan amnesti.
3. yang berhak mendapatkan amnesti.
4. pertimbangan dalam memberikan amnesti.
5. Yang berwenang memberikan pertimbangan agar amnesti dapat diberikan.
6. Setelah diberikan amnesti bagaimana status hukumnya atas pemberian amnesti tersebut.
7. Dasarnya amnesti diberikan sehingga perlu diberikannya amnesti.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang kewenangan pemberian amnesti secara khusus belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, namun penelitian yang membahas tentang kewenangan presiden dalam memberikan grasi telah dilakukan oleh saudara Hasan Faizi pada tahun 1997, jurusan Mu'amalah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Pidana Mati". Dalam skripsi ini meneliti definisi grasi menurut bahasa dan menurut istilah berdasarkan Undang-Undang Grasi Lembaran Negara Nomor. 40 Tahun 1950, dan juga lebih berfokus pada pemberian grasi yang merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia yang berkenaan dengan tindak pidana mati yang tertera dalam KUHP, serta ditinjau dari Hukum Islam.

Sedangkan Santoso pada tahun 2008 jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsinya "Pengajuan Grasi yang Berulang-Ulang Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 dan Hukum Islam" mengkaji mengenai prosedur pengajuan grasi, dan akibat dari pengajuan grasi yang berulang-ulang dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 dan menurut Hukum Islam.

Jadi dalam penelitian sebelumnya tentang kewenangan presiden dalam bidang hukum hanya pada pemberian grasi dan pengajuan grasi, dari skripsi-skripsi tersebut penulis memastikan bahwa penelitian tentang kewenangan

masalah kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua; merupakan uraian tentang amnesti menurut pandangan hukum pidana Islam. Dalam sub bab terdiri dari pengertian amnesti dalam hukum pidana Islam, dasar hukum amnesti, tindak pidana yang dapat diberikan amnesti menurut pandangan hukum pidana Islam, dan kewenangan pemberian amnesti menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga; merupakan bab yang berisikan uraian tentang amnesti dalam hukum positif. Dalam sub bab terdiri dari pengertian amnesti dan dasar hukum amnesti, dasar dikeluarkannya undang-undang amnesti, pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana politik dan pelanggaran HAM, dan prosedur pemberian amnesti menurut hukum positif, serta beberapa contoh amnesti yang sudah dilakukan.

Bab keempat; merupakan bab analisis Hukum Pidana Islam terhadap pemberian amnesti bagi pelaku kejahatan politik di Indonesia.

Bab kelima; merupakan bab penutup dari keseluruhan uraian sebagai jawaban terhadap pokok masalah dan disertai saran yang dirasakan perlu.

diluar jarimah tersebut bisa dikenai dengan hukuman yang sesuai. Pelaku pemberontakan yang melakukan kejahatan-kejahatan diluar pemberontakan seperti membunuh, zina, memperkosa, mencuri, mereka tidak dapat diberi *syafā'at*. Pelaku pemberontakan atau *al-bagyu* yang disertai tindak pidana politik barulah dapat diberikan *syafā'at* (amnesti) oleh ulil amri atau kepala Negara.

Tindakan jarimah tersebut merupakan *jarimah ta'zīr* karena dalam melakukan tindakan pemberontakan tidak penuh atau dalam melakukan pemberontakan tidak terpenuhi adanya syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman *hudud* dan ulil amri dapat memberikan pengampunan. Karena nantinya akan dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Maksud utama dari sanksi *ta'zīr* ini adalah sebagai *preventif* dan *represif* serta *kuratif* dan *edukatif*. Yang dimaksud dengan fungsi *preventif* adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. Yang dimaksud dengan fungsi *represif* adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Oleh karena itu, sanksi *ta'zīr* baik dalam fungsinya sebagai usaha *preventif* maupun *represif*, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

Pemberian amnesti terhadap pelaku jarimah pemberontakan, hanya diberikan kepada pelaku yang melakukan pemberontakan murni, apabila pelaku melakukan pembunuhan, pencurian, sebelum melakukan pemberontakan maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gedung amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semua itu tidak dihukum dengan hukuman untuk jarimah biasa, melainkan dengan hukuman untuk jarimah pemberontakan yaitu hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (amnesti). Dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pemberontakan dengan cara melakukan perlawanan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakannya dan melumpuhkannya, hukuman ini berlaku dalam situasi perang, hanya saja dalam kenyataannya, perang atau penumpasan tidak bisa dianggap sebagai hukuman, melainkan suatu upaya represif guna mencegah dan menindas pemberontak, serta mengembalikannya kepada sikap taat dan patuh kepada pemerintah yang sah. Apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjatanya, perlawanan terhadap pemberontak harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Dan selanjutnya pemerintah atau ulil amri boleh mengampuni mereka.

Kewenangan pemberian amnesti/*syafā'at* sepenuhnya merupakan hak ulil amri, pemberian dilakukan setelah Negara benar-benar dalam keadaan tenang dan

- d) Pasal 137 KUHP yang mengatur tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau wakil Presiden.
- e) Pasal 139 ayat (2) dan (3) KUHP yang memberikan kemungkinan penjatuhan pidana yang berupa pencabutan beberapa hak dalam pasal 35 KUHP terhadap berbagai tindak pidana yang diatur dalam Bab II KUHP.

3) BAB III: Kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap kepala dan wakil negara yang bersahabat.

Tindak pidana terhadap negara sahabat diatur dalam Bab III Buku II KUHP. Dilihat dari rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam bab ini terlihat, bahwa rumusan-rumusan tindak pidana dalam bab ini mirip sekali dengan rumusan-rumusan tindak pidana dalam Bab I dan Bab II Buku II KUHP. Perbedaan antara rumusan tindak pidana dalam kedua bab tersebut terletak pada sasaran atau obyeknya. Dalam tindak pidana yang diatur dalam Bab III Buku II KUHP sasarannya adalah keamanan negara sahabat baik menyangkut kepala negara atau kepala pemerintahan maupun terhadap keutuhan negara sahabat. Sementara dalam Bab I dan Bab II Buku II KUHP sasarannya adalah keamanan negara (sendiri) baik terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan maupun terhadap keutuhan negara (sendiri).

- a) Tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat, atau memaksa badan-badan tersebut untuk mengambil atau tidak mengambil keputusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, yang diatur dalam Pasal 146 KUHP.
- b) Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sengaja merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah, atau badan perwakilan rakyat untuk menghadiri sidang badan tersebut, yang diatur dalam Pasal 147 KUHP.
- c) Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menghalangi/merintangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tidak terganggu, yang diatur dalam Pasal 148 KUHP.
- d) Tindak pidana penyuapan dalam suatu pemilihan agar orang tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya menggunakan hak pilihnya dengan secara tertentu, yang diatur dalam Pasal 149 KUHP.
- e) Tindak pidana melakukan tipu muslihat pada waktu diselenggarakan pemilihan, yang mengakibatkan suara dari

- 6) Melakukan perusakan atau menghancurkan bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum ataupun milik perseorangan atau badan yang dilakukan secara luas.
- 7) Melakukan kegiatan mata-mata.
- 8) Melakukan Sabotase.

D. Prosedur Pemberian Amnesti Di Indonesia dan Beberapa Contoh Amnesti Yang Sudah Dilakukan

1. Prosedur Pemberian Amnesti Di Indonesia

Pemberian amnesti di Indonesia merupakan sepenuhnya kewenangan presiden yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian amnesti ini haruslah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 14 ayat 2 Yang menyebutkan "*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*". Kewenangan ini mutlak ditangan presiden dalam menjalankan fungsinya yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, meskipun dalam memberikan amnesti perlu memperhatikan pertimbangan Badan Legislatif. Amnesti merupakan hak prerogatif presiden dalam bidang yudikatif, tetapi presiden dalam menggunakan hak ini bukan merupakan campur tangan atau mencampuri kewenangan lembaga yudikatif, tetapi merupakan tugas atau

Dalam memberikan amnesti ini sepenuhnya adalah merupakan hak presiden sebagai kepala negara, amnesti hanya boleh diberikan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan politik. Dalam memberikan amnesti presiden haruslah meminta nasihat tertulis dari Mahkamah Agung lewat mentrinya, meskipun ini tidak mengganggu kewenangan presiden dalam memberikan amnesti

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan kewenangan presiden sebagai Kepala Negara.

Hak presiden dalam memberikan amnesti ini hanya kepada pelaku tindak pidana politik, dalam pasal 2 menyebutkan:

"Amnesti dan Abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda"

Untuk menentukan tindak pidana politik dapatlah diminta nasehat dari Mahkamah Agung, ketentuan ini terdapat pada Pasal 3:

"Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasihat dari Mahkamah Agung"

Pemberian amnesti oleh presiden dapat menghapuskan semua akibat hukum pidana bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana politik. Amnesti dapat diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan

menjatuhkan hukuman ditentukan sepenuhnya oleh ulil amri dan pemberian pengampunan atau *Syafā'at* pada jarimah ini boleh diberikan oleh ulil amri.

Kejahatan yang dapat diberikan syafā'at dalam hukum pidana Islam ialah tindak pidana politik atau *al-jarīmah Al-siyāsiyah* dan *jarīmah al-bagyu* (pemberontakan) yang didalamnya terdapat motif politis, yaitu dengan maksud menentang ulil amri disertai kekuatan senjata dan ada pemimpinnya serta dilakukan dalam situasi negara tidak normal. Pemberontakan ini juga disertai dengan alasan (*ta'wil*), alasan ini merupakan alasan politis sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pemberontakan yang targetnya mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan pemerintahan yang sah, tindak pidana ini juga disertai dengan perbuatan makar, perbuatan makar dapat dilakukan seorang maupun berkelompok, perbuatan ini disebut makar apabila dalam mewujudkan rencana dan siasatnya lebih ditekankan pada aspek tipu dayanya. Dalam tindakan pemberontakan ini merupakan tindakan pemberontakan yang tidak penuh, maka hukumanya dikenai dengan sanksi *ta'zir*. Karena *jarīmah-jarīmah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumnya oleh *syara'* (*hudūd*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum dipenuhi. Dan begitu pula *jarīmah al-siyāsiyah* juga merupakan tindakan jarimah yang belum ada ketentuannya dalam naṣ, maka sanksi hukumanya dapat

seperti ini juga sama dengan yang ada di Indonesia bahwa presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti kepada pelaku kejahatan politik atau pemberontak yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang, dalam memberikan amnesti ini presiden haruslah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ini tidak mengganggu kewenangan presiden dalam memberikan amnesti.

tersabut belum dipenuhi juga termasuk dalam jarimah ta'zir. Seperti tindakan jarimah pemberontakan yang hanya motifnya politis dan terdapat unsur makar apabila dalam mewujudkan rencana dan siasatnya lebih ditekankan pada aspek tipu dayanya. Bolehnya memberikan ampunan kepada pelaku jarimah ini, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud: "saling beri maafkah kamu dalam jarimah *hudūd* yang terjadi antara kamu, jarimah *hudūd* yang sampai kepada tangan pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya". Pemberian *syafā'at* ini juga langsung diberikan oleh ulil amri, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu menaklukan kota Makkah, dan memberikan pengampunan terhadap tawanan pada saat memenangkan perang Hunain. Pemberian pengampunan diatas merupakan pengampunan umum (amnesti) yang berlaku bagi perseorangan maupun kelompok, yang diberikan langsung oleh Nabi SAW sebagai pemimpin kaum muslimin kepada orang-orang yang memusuhi Nabi SAW dan yang memberontak kepada Nabi Muhammad SAW.

- Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2006
- Kansil, cristine S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003
- , *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Markus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Cet. Pertama, 1997
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 2007
- Muchtar Rosyidi, *Penuntun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- al, Ghazali, Muhammad, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2003
- Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana (Asas, Acara, Pidana I, Pidana II)*, Yogyakarta, Liberti, 1984
- O. Hashem, *Muhammad Sang Nabi: Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail*, Jakarta, Ufuk Press, 2007
- Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandug, CV. Pustaka Setia, 2000
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2002
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

